

# *Bagian 1*

## **PENDAHULUAN**

Gerakan sosial keagamaan muncul sebagai sebuah fenomena yang ingin menawarkan kepada publik bahwa prinsip-prinsip sekuler yang menjauhkan manusia dari Tuhan merupakan sebuah kerugian yang nyata bagi peradaban manusia. Berbagai persoalan umat manusia seperti kehidupan seks bebas, pengrusakan lingkungan, peperangan, kemiskinan, korupsi, konsumerisme, dan sebagainya dianggap buah dari kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama.

Gerakan sosial keagamaan sebenarnya sudah muncul saat modernisasi berkembang pada awal abad ke-0 di Eropa. Modernisasi merupakan cikal bakal bagi sebuah peri kehidupan yang rasionalitas empiris dalam melihat kehidupan. Penghambaan pada pandangan dunia saintifik membuat agama dipojokkan dalam kehidupan publik, terutama di negara-negara Eropa. Fenomena yang sangat tegas memicu bangkitnya gerakan sosial keagamaan adalah fenomena sekularisme yang ditiupkan oleh peradaban Barat. Kaufmann, Goujon dan Skirbekk (2012: 71) menguraikan sebuah pandangan bahwa:

*Secularization theorists claim that human development, social differentiation, expressive individualism, and cultural relativism lead to religious decline in modern societies.*

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa bagi para teoritikus sekularisme, ada yang berpandangan bahwa dengan adanya diferensiasi sosial, ekspresi individualitas dan relativisme kultural maka dengan sendirinya akan menyebabkan agama mengalami kemunduran dalam masyarakat modern. Keyakinan seperti itu kemudian diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan politik. Penggabungan sekularisme dan politik memunculkan sekularisme politik (*political secularism*). Madood (2012: 130) menyatakan bahwa:

*By secularism or more specifically political secularism, I mean institutional arrangements such that religious authority and religious reasons for action and political authority and political reasons for action are distinguished; so, political authority does not rest on religious authority and the latter does not dominate political authority.*

Bagi sekularisme atau secara spesifik sekularisme politik menyatakan bahwa otoritas religius dan alasan-alasan religius bagi sebuah tindakan serta otoritas politik dan alasan-alasan politik bagi sebuah tindakan adalah berbeda. Oleh karena itu, otoritas politik tidak bersandar atas otoritas religius dan sebaliknya otoritas religius tidak mendominasi otoritas politik.

Maraknya fenomena sekularisme, terutama sekularisme kehidupan publik memunculkan diskursus hubungan agama dengan negara, yang puncak diskursusnya pada pandangan gerakan sosial

keagamaan. Hubungan agama dan negara adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan yang pada dasarnya masih bersifat problematik. Pada satu sisi, hubungan yang terjadi dianggap tidak bermasalah bahkan ada optimisme bahwa hubungan agama dan negara dapat diharmonisasikan. Namun, pada sisi lain, ada sebagian juga beranggapan bahwa hubungan keduanya bersifat antagonistik.

Dalam gerakan Islam di tanah air, pandangan seperti ini juga dapat ditemukan pada organisasi keislaman yang memandang bahwa Khilafah Islamiyah merupakan jalan satu-satunya dasar yang paling benar untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan negara. Pancasila sebagai ideologi negara tidak dianggap mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara adil-sejahtera lahir dan batin.

Pandangan seperti itu merupakan bentuk antagonisme agama versus negara. Hubungan keduanya bersifat kontradiktif. Rivalitas tersebut tidak akan pernah terpecahkan sebelum yang satu dikalahkan oleh yang lain. Pandangan ini tentunya memiliki legitimasi teologis. Machasin dalam tulisannya "*Teologi Politik Perspektif Islam*" dalam Sumartana, Qadir, Sarapung, dan Bless (2002: 9) menyatakan "Perumusan ajaran keagamaan, akhirnya terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak akan lepas dari pergumulan politik. Anggapan atau keyakinan bahwa Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara) merupakan konsekuensi logis dari perkembangan itu". Dalam keadaan ini, agama dan penyelenggaraan negara menyatu dan saling memasuki. Yang bertindak sebagai imam salat jamaah, misalnya khalifah, untuk ibu kota negara. Di ibu kota provinsi jabatan itu disandang gubernur, demikian seterusnya sampai ke tingkat desa.

Konfigurasi gerakan Islam di tanah air menunjukkan bahwa pandangan harmonisasi dan rivalitas agama dengan negara tumbuh

subur di tanah air. Negara memberikan ruang mengekspresikan diri, meski pada dasarnya dapat dilihat bahwa negara tentunya akan memihak pandangan harmonisasi. Negara pada satu sisi memberikan ruang berekspresi bagi pandangan rivalitas agama versus negara, tetapi pada sisi lain negara tentunya menganggap kelompok ini merupakan bahaya laten yang mesti diawasi terus-menerus.

Salah satu rivalitas yang kadang mengemuka adalah gagasan Islam dan demokrasi yang sifatnya masih problematik, yang mana demokratisasi dianggap bagian dari kepentingan Barat yang tidak bersesuaian dengan pandangan Islam. Hal itu tampak jelas pada pandangan Sheikh (2003: 12) yang menyatakan bahwa:

*Islam has figured prominently in post-cold war paradigm of international politics. Given the disappearance of the communist threat, leading scholars within the discipline of international relation have described Islam as the “next ideological” threat vis-à-vis the current world order. Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Joseph Nye, R.D Kaplan and numerous other scholars have painted a picture of Islam as a “monolithic” and “unified threat” to western interest.*

Islam merupakan agama yang menonjol pada pasca perang dingin dalam politik internasional. Sejak menghilangnya ancaman komunisme, menyebabkan banyak ahli dalam disiplin hubungan internasional menggambarkan Islam sebagai ideologi selanjutnya yang mengancam tatanan dunia yang dibangun Barat. Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Joseph Nye, R.D Kaplan dan ahli-ahli lainnya telah melukiskan Islam sebagai monolitik dan ancaman tunggal kepentingan Barat.

Meskipun demikian, di kalangan cendekiawan muslim lain juga cenderung tidak mempermasalahkan demokrasi sebagai sebuah tatanan politik. Hal ini tampak jelas pada pernyataan David Herbert dalam Haynes (2009: 240) yang menyatakan bahwa:

*Beyond the Arab World, Islamist has regularly run for election in Pakistan, Bangladesh and Turkey since the 1980s. In Indonesia, Malaysia, and the Islamic Republik of the former Soviet Union, Islamist have peacefully been engaging in local and municipal politics ... it is important to note that in three of the biggest Moslem countries (Pakistan, Bangladesh, Turkey) women have recently been elected to the top executive office in the land ... the important thing of all these case is that Islamic parties have accepted the rules of the democratic game and are playing it peaceably and in an orderly manner.*

Di luar dunia Arab, umat Islam secara reguler menyelenggarakan pemilihan umum di Pakistan, Bangladesh, dan Turki sejak 1980-an. Di Indonesia, Malaysia dan negara-negara Islam di bekas Uni Soviet, Islam secara damai bersesuaian dalam politik lokal dan kota. Hal ini sangat penting untuk dicatat bahwa tiga negara terbesar Islam (Pakistan, Bangladesh, Turkey) perempuan juga dipilih untuk jabatan *top executive*. Serta berbagai hal lain yang telah ikut dilakukan, hal yang penting dari seluruh kasus yang ada bahwa partai-partai Islam telah menerima aturan demokrasi dan melaksanakannya secara damai dan beradab.

Gerakan sosial keagamaan yang dijalankan oleh sebuah organisasi keberagamaan harus dikuatkan dengan militansi/spirit yang baik dari para pengikutnya. Militansi/spirit ini adalah sikap yang

dipupuk selama bertahun-tahun. Sikap militan menjadi harga mati. Fenomena sikap militan dapat dilihat pada pergolakan konfliktual antara kelompok keagamaan dengan pemerintah misalnya. Kasus pejuang Taliban di Afganistan adalah contoh bagaimana sikap militan menjadi penopang kohesivitas sosial kelompok agama tertentu. Pada titik inilah penting untuk dicermati bagaimana sikap militan itu dibentuk dan bagaimana perilaku sosial mereka. Pada titik inilah penulis meyakini persoalan sikap anggota gerakan sosial keagamaan menjadi sangat penting, terutama pembelaannya atas pandangan hubungan agama dengan negara.

Gerakan sosial keagamaan pada dasarnya adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang kompleks yang melibatkan keterhubungan individu dengan individu, individu dengan kelompoknya atau kelompok dengan kelompok lainnya. Dikarenakan gerakan sosial keagamaan merupakan sosialisasi nilai, ide, dan tujuan perjuangan organisasi keagamaan tertentu maka bagaimana sebuah organisasi menjalin interaksi untuk memperkuat posisinya agar cita-cita organisasinya dapat terwujud.

Di sinilah letak pentingnya mengkaji bagaimana sebuah organisasi keagamaan merancang model interaksi sosial mereka agar nilai, ide, dan tujuan mereka bisa diterima di masyarakat. Fenomena yang terbaik yang bisa dikemukakan adalah bagaimana masjid-masjid dan forum-forum ilmiah keagamaan dijadikan medium membangun jaringan komunikasi dengan organisasi lainnya. Interaksi sosial yang ditempuh tentu saja berkenaan dengan pemihakan apakah negara dengan agama adalah satu yang menghasilkan negara agama ataukah tidak. Fenomena dialektika negara agama versus negara sekuler dalam dunia studi agama merupakan fenomena intelektual yang layak diapresiasi.

Dari keseluruhan fenomena yang disebutkan di atas dicari faktanya (objek penelitian) yang dilakukan oleh penulis adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Makassar. Mengapa HTI Kota Makassar menjadi penting karena diskursus hubungan agama dengan negara merupakan topik sentral doktrin Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi keislaman yang memosisikan dirinya sebagai organisasi yang mendukung gerakan Khilafah Islamiyah yang tentunya sebagai antitesis perdaban Barat yang dianggap zalim. Konsep Khilafah Islamiyah merupakan landasan utama gerakan atau biasa disebut ideologi gerakan HTI Kota Makassar. Ciri perjuangan HTI Kota Makassar adalah bersifat ideologis-politis.

Permasalahan sekularisme dan kebangkitan dunia Islam menjadi pokok masalah utama perjuangan HTI Kota Makassar. Lembaga keagamaan ini telah menemukan strategi gerakan sosial dalam mewujudkan cita-cita Khilafah Islamiyah mereka. Namun, tidak sedikit persoalan utama justru terletak pada model strategi gerakan sosial mereka yang dianggap kurang efektif dalam mewujudkan cita-cita mereka. Dalam studi pendahuluan kami, terlihat bahwa masalah utamanya terletak pada utopisnya gerakan sosial keagamaan mereka. Hal itu menjadikan penulis memiliki dugaan kuat bahwa persoalan utama bukan hanya sekadar formulasi strategi gerakan sosial mereka, tetapi juga kelemahan-kelemahan yang bisa ditemukan secara individual pada anggota mereka.

Keengganan memasuki ranah politik struktural dan kelemahan sumber daya lainnya menjadi faktor yang ditemukan peneliti pada studi awal penelitian ini. Selain itu, interaksi sosial mereka dalam menyosialisasikan konsep khilafah yang merupakan pandangan HTI Kota Makassar atas hubungan agama dengan negara memiliki beberapa kelemahan. Tujuan mengubah ideologi negara

menjadi alat sandungan bagi HTI Kota Makassar dalam membangun interaksi sosial yang luas. Apalagi interaksi sosial yang luas ini akan sangat mudah dijadikan kekuatan dalam mencapai cita-cita mereka. Hal tersebut merupakan beragam faktor yang menjadi pusat masalah dalam penelitian ini.

HTI Kota Makassar selama ini telah dikenal sebagai organisasi keagamaan yang secara tegas mengumandangkan gagasan Khilafah Islamiyah dan memiliki pola-pola gerakan yang sangat sistematis. Pola gerakan HTI Kota Makassar mengambil dua bentuk sebagai berikut:

1. pola internal, yakni membentuk kader militan lewat kaderisasi dan radikalisasi pemikiran dan
2. pola eksternal dengan melakukan gerakan seperti demonstrasi dan penggalangan massa dengan tujuan untuk pencitraan akan keberadaan mereka yang membela kaum tertindas.

Gerakannya bersifat sistematis dan sarat kepentingan ideologis yang non kompromistik, terutama dengan peradaban yang dianggap telah menghancurkan Islam. Bagi HTI Kota Makassar, peradaban-peradaban di dunia pada dasarnya berupa hubungan konfliktual. Mereka menolak dialog peradaban dengan mengajukan beragam argumentasi berdasarkan landasan Alquran dan hadis. Hal itulah yang membuat HTI Kota Makassar mengajak umat Islam untuk melawan seluruh peradaban yang dianggap bertentangan dengan Islam. Pendapat seperti ini menjadikan Hizbut Tahrir (HT) di beberapa tempat, misalnya di Asia Tengah, mengalami represi dari pemegang otoritas pemerintahan.

Imbauan organisasi HTI Kota Makassar yang berkaitan dengan penolakan mereka terhadap dialog antarperadaban seperti



yang termaktub dalam al-Jawi (2002: 159-161). “Benturan peradaban merupakan sebuah keniscayaan. Benturan peradaban ada sejak dulu sampai sekarang, dan tetap akan ada hingga menjelang hari akhir. Wahai kaum Muslim, jangan Anda pernah teperdaya oleh para penyeru dialog antaragama dan antarperadaban yang tidak mau menerima kenyataan, membiarkan segala penghinaan, dan kekalahan di hadapan kaum kafir! Siapkan diri Anda untuk menghadapi konflik itu karena peradaban kapitalisme Barat telah menyerang Anda, baik secara militer, politik, ataupun ekonomi. Namun demikian, mereka tidak akan mampu mengalahkan pemikiran kaum Muslim. Karena akidah Anda adalah akidah yang tak terkalahkan; akidah yang akan selalu tertancap dalam jiwa. Hanya saja sebagian pemikiran-pemikiran yang berasal dari akidah Anda itu telah terkontaminasi maka berjuanglah untuk memurnikannya, dan menyingkirkan debu dan kotoran darinya dengan cara mengembalikan Alquran dan Sunah sebagai pedoman!

Berhati-hatilah jangan sampai Anda menerima berbagai pemikiran yang tidak disertai dalil atau menerima pernyataan yang disertai dalil-dalil, tetapi bukan dari *mujtahid* atau dari orang yang menerima pemikiran dari non *mujtahid*! Saat ini adalah zaman para pemimpin yang jahil (bodoh), yang gemar memberikan fatwa tanpa landasan dan pengetahuan. Maka, waspadalah dengan orang-orang seperti ini! Carilah para ulama yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas, dan ambillah (pemahaman) agama Anda dari mereka karena mereka bagaikan lampu penerang dalam kegelapan, meski saat ini jumlah mereka tidak banyak. Dan ketahuilah bahwa kemenangan dan pertolongan pada akhirnya adalah milik Islam dan kaum Muslim. Inilah janji Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Dalam nash-nash yang pasti (*akhbar qath'iyah*)! Maka tetaplah beriman kepada kabar

gembira dari Allah Swt.! Berjuanglah untuk menegakkan khilafah dan menyatukan umat dalam satu jamaah di bawah kepemimpinan seorang khalifah, yang akan membuat berbagai persiapan, menyatukan umat, menggentarkan musuh-musuh umat, melindungi negeri-negeri kaum Muslim, mengurus dan memperlakukan warga negaranya secara adil, dan Allah—melalui tangan khalifah itu—akan menjadikan Islam sebagai agama yang menang di atas segala agama lainnya, meski kaum musyrikin tidak menyukainya”.

Dari kacamata sosiologi gerakan keagamaan maka Hizbut Tahrir Kota Makassar pada dasarnya mengembangkan pola interaksi sosial yang berketegangan batas bersifat konfliktual. Hal ini tecermin dari gagasan yang sudah disebutkan bahwa pada dasarnya tidak mengakui akan konsep dialog peradaban. HTI Kota Makassar bahkan menegaskan bahwa hubungan antara peradaban bersifat konfliktual. Gagasan ini sedikit banyak memiliki kesamaan substansi dengan konsep *the clash of civilizationnya* Samuel P Huntington.

Dari penelitian awal, saya menemukan bahwa HTI Kota Makassar telah berkembang cukup pesat. HTI Kota Makassar, secara struktural terdiri atas delapan pengurus yang membidangi departemen atau *lajnah*, yakni departemen khusus intelektual, ulama, tokoh politik, dan *public relation*. Adapun dari hasil wawancara awal saya tentang jumlah anggota, pengurus dalam hal ini humas Hizbut Tahrir DPP Sulawesi Selatan menyatakan agak sulit diprediksi dikarenakan anggota yang dihasilkan melalui pengkaderan bertambah terus. Dalam konferensi Rajab diperkirakan jumlah anggota untuk DPP Makassar kurang lebih 10.000 orang. Adapun program rutin Hizbut Tahrir adalah penyebaran opini dengan beragam bentuk tentang Khilafah Islamiyah dan rekrutmen anggota. Sentral aktivitas HTI Kota Makassar berada di Jalan Maccini Sawah No. 4A. Sentral